

## KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DI KALIMANTAN TIMUR

### INEQUALITY OF ACCESS TO EDUCATION IN EAST KALIMANTAN

Ika Ayuningtyas  
BPS Provinsi Kalimantan Timur  
E-mail: [ika.ayu@bps.go.id](mailto:ika.ayu@bps.go.id)

Naskah diterima tanggal: 27-07-2021 disetujui tanggal: 31-10-2021

**Abstract:** *This article aims to measure the opportunities for children aged 7-18 years in East Kalimantan to access education. The measurement uses the Human Opportunity Index (HOI) developed by the World Bank. This index is used to see circumstances beyond the control of children to determine their opportunity to get an education. Based on National Socio-Economic Survey in March 2020, almost all children aged 7-15 years have been able to access basic education. However, there are still inequality opportunities for access to secondary education for children aged 16-18 years in East Kalimantan. There is no inequality due to gender bias at both levels of education. Factors that influence inequality in access to secondary education are the head of family's education, family's economic conditions, and children's residence location. The level of inequality of access to secondary education is lower in rural areas than in urban areas. Policy reform in education is urgently needed to eliminate the link between children's access to education and circumstances beyond a child's control, such as family background or place of residence. Policies that can be taken into consideration include increasing the number of secondary schools, increasing access to transportation and infrastructure to facilitate access to education.*

**Keywords:** *basic and secondary education, disparity access to education, Human Opportunity Index*

**Abstrak:** *Artikel ini bertujuan mengukur kesempatan anak usia 7-18 tahun di Kalimantan Timur dalam mendapatkan akses pendidikan. Pengukuran kesempatan menggunakan Human Opportunity Index (HOI) yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Indeks ini digunakan untuk melihat keadaan di luar kendali seorang anak dan menentukan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Hasil analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020 menunjukkan hampir seluruh anak usia 7-15 tahun di Kalimantan Timur telah dapat mengakses pendidikan dasar. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan menengah pada anak usia 16-18 tahun. Tidak terdapat perbedaan akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan di kedua jenjang pendidikan. Faktor latar belakang keluarga, yakni pendidikan kepala keluarga dan kondisi ekonomi, serta tempat tinggal anak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan akses menuju pendidikan menengah. Tingkat ketimpangan akses pendidikan menengah lebih rendah di wilayah perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Reformasi kebijakan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk menghilangkan keterkaitan antara akses pendidikan anak dengan keadaan di luar kontrol seorang anak, seperti latar belakang keluarga atau tempat tinggal. Kebijakan yang bisa diambil antara lain memperbanyak jumlah sekolah menengah, serta meningkatkan akses transportasi dan infrastruktur jalan untuk mempermudah akses pendidikan.*

**Kata kunci:** *pendidikan dasar dan menengah, kesenjangan akses pendidikan, Human Opportunity Index*

## PENDAHULUAN

Pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan selain berperan penting sebagai modal untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas juga berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kontribusi pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (Adriani, 2019). Seseorang dengan pendidikan tinggi akan sejalan dengan tingginya produktivitas yang dimiliki yang pada akhirnya akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, masalah ketimpangan atau kesenjangan di bidang pendidikan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang belum tuntas diatasi. Indonesia disebutkan memiliki ketimpangan pendidikan dengan kategori sedang sepanjang periode 2016-2018 (Harahap, Maipita, & Rahmadana, 2020).

Ketimpangan pendidikan ini sebenarnya sudah cukup banyak diteliti di Indonesia. Azzizah (2015) menunjukkan bahwa kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan ketimpangan pendapatan menyebabkan terjadinya disparitas pendidikan di Indonesia. Hidayat (2018) mengemukakan beberapa faktor penyebab kesenjangan pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya kualitas sarana sekolah, rendahnya kualitas guru, faktor infrastruktur, jumlah dan kualitas buku (referensi), mahal biaya pendidikan, serta adanya pengelompokan sekolah (Sekolah Berstandar Nasional/SBN dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/RSBI). Bustomi (2012) menyimpulkan bahwa ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori rendah. Faktor signifikan yang memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di Jawa Tengah yakni pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan angka harapan hidup yang memberikan pengaruh negatif, sedangkan gender gap memberikan pengaruh positif. Sholikhah, Suratman, Soesatyo, & Soejoto (2014)

mengungkap adanya ketimpangan pendidikan di Jawa Timur yang disebabkan variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pendidikan dari rumah tangga. Sementara itu, Harahap, *et al.* (2020) menyatakan bahwa ketimpangan pendidikan di Kalimantan Timur dipengaruhi secara signifikan oleh adanya ketimpangan pendapatan, kemiskinan, serta ketimpangan gender.

Berbagai kajian di atas masih berfokus pada ketimpangan hasil. Keadilan atau kesetaraan hanya berdasarkan distribusi atau alokasi. Ketimpangan kesempatan juga harus menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan publik. Kebijakan tidak lagi berfokus pada mengurangi ketimpangan hasil, tetapi juga berfokus pada pengurangan ketimpangan yang muncul akibat adanya kesempatan yang tidak merata.

Permasalahan ketimpangan kesempatan adalah sulitnya sebagian orang mendapatkan kesempatan atau akses untuk mendapatkan hidup yang lebih baik (Indra, 2015; Barros, Vega, Saavedra, Carvallo, Franco, & Freije, 2008). Kesulitan pencapaian kondisi sosial ekonomi yang lebih baik di masa depan kadang kala disebabkan adanya kondisi atau keadaan di luar kendali seseorang, seperti jenis kelamin, tempat kelahiran, atau latar belakang keluarga. Secara umum, ketimpangan kesempatan dapat mencakup segala aspek, seperti pendidikan, pendapatan, maupun teknologi informasi. Menurunkan tingkat ketimpangan kesempatan bermakna terus mengupayakan keadilan kesempatan atau akses bagi setiap warga negara dalam upaya memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk dapat menikmati layanan pendidikan. Namun, tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini secara merata. Misalnya, di beberapa wilayah terdapat anak yang tidak dapat menikmati pendidikan karena jenis kelamin, tempat tinggal, atau keadaan keluarga. Kesempatan

memperoleh pendidikan sangat penting karena akan memengaruhi kebaikan di masa depan, baik untuk anak maupun negara/wilayah. Oleh karena itu, pengukuran ketidaksetaraan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan menjadi penting agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran, yaitu layanan pendidikan yang disediakan untuk masyarakat benar-benar dapat dinikmati secara merata.

Salah satu alat yang secara khusus digunakan melihat adanya ketimpangan kesempatan yakni *Human Opportunity Index (HOI)* yang dikembangkan oleh World Bank (Barros *et al.*, 2008). World Bank mengembangkan *HOI* untuk mengukur ketidaksetaraan peluang yang dikontribusikan oleh keadaan sosial ekonomi dan demografis individu. Ketimpangan kesempatan yang disebabkan oleh perbedaan keadaan dianggap tidak adil dan harus menjadi perhatian masyarakat. Ketika seorang anak tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak, misalnya karena keluarganya termasuk kelompok sosial yang rendah atau berjenis kelamin perempuan, hal ini tentu merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang berat.

Penelitian yang menggunakan *HOI* ini telah banyak dimanfaatkan di banyak negara. Molinas Vega, *et al.* (2012) menggunakan metode *HOI* untuk mengukur ketimpangan kesempatan anak di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia terhadap akses menuju layanan dasar, seperti pendidikan dan perumahan. Jemmali dan Amara (2018) serta Mokaddem dan Saied (2019) juga memanfaatkan *HOI* untuk mengukur ketimpangan kesempatan masyarakat Tunisia dalam mengakses pendidikan dan infrastruktur dasar. Newman (2012) menggunakan *HOI* untuk melihat ketimpangan kesempatan anak di Pakistan dalam memperoleh akses menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Son (2012) memanfaatkan *HOI* untuk mengukur ketidaksetaraan dalam mengakses pendidikan dan infrastruktur dasar pada beberapa negara berkembang di Asia. Vani

dan Madheswaran (2018) juga menggunakan metode *HOI* untuk mengukur ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, serta perumahan bagi masyarakat India. Akan tetapi, pemanfaatan *HOI* ini masih sangat terbatas di Indonesia. Darmawati & Suhariyanto (2019) menggunakan *HOI* untuk melihat ketimpangan kesempatan anak Indonesia terhadap pelayanan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, perumahan yang sehat, akses listrik, serta teknologi informasi. Mardison (2021, 2020) menggunakan *HOI* untuk melihat kesenjangan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat.

Ketimpangan kesempatan anak terhadap akses pendidikan ini belum banyak dikaji di wilayah Kalimantan Timur. Darmawati & Suhariyanto (2019) menyatakan bahwa Kawasan Timur Indonesia, termasuk seluruh Pulau Kalimantan, memiliki kesenjangan akses pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Sementara itu, Harahap, *et al.* (2020) juga menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki ketimpangan pendidikan dengan kategori sedang. Padahal, di sisi lain capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tercatat telah berstatus tinggi. Status ini menandai capaian pembangunan manusia dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak di Kalimantan Timur yang sudah sangat baik (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2020).

Pada naskah tulisan ini akan dibahas mengenai ketimpangan akses pada anak berusia 7-18 tahun terhadap pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Timur. Artikel ini memanfaatkan *HOI* dengan memperhatikan berbagai karakteristik dan kondisi yang dimiliki anak. Keadaan yang dimiliki pada masa kanak-kanak akan berpotensi memengaruhi masa depan mereka. Indeks ini akan digunakan untuk mendukung kebijakan publik di bidang pendidikan sebagai alat bantu menyamakan kesempatan atau peluang dalam memperoleh akses

pendidikan (Indra, 2015). Pembahasan mengenai ketimpangan kesempatan anak terhadap akses pendidikan menjadi penting karena dari kajian ini dapat diketahui sejauh mana upaya keberhasilan program kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan.

## METODE

### **Human Opportunity Index (HOI)**

HOI dapat diinterpretasikan sebagai ukuran seberapa besar ketersediaan layanan untuk kemajuan kehidupan (misalnya pendidikan), dengan penalti berupa seberapa tidak adil layanan tersebut didistribusikan di antara penduduk. Misalnya, dua wilayah memiliki cakupan layanan pendidikan yang sama mungkin memiliki HOI yang berbeda. Perbedaan nilai HOI dapat disebabkan oleh perbedaan layanan yang diterima oleh penduduk akibat jenis kelamin, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga atau berbagai keadaan pribadi di luar kendali mereka. Dengan kata lain, HOI adalah cakupan yang dikoreksi untuk kesetaraan (Molinas Vega *et al.*, 2012). Secara umum, HOI dinyatakan dalam persamaan berikut.

$$HOI = \bar{p}(1 - D) \quad \dots\dots\dots(1)$$

$\bar{p}$  = rata-rata *coverage*

D = nilai ketimpangan (*dissimilarity index*)

HOI berkisar dari nilai 0 hingga 100. HOI bernilai 0 apabila nilai D sama dengan 1 dan bernilai 100 apabila nilai  $\bar{p}$  sama dengan 100 dan nilai D sama dengan nol (Barros *et al.*, 2008). Penghitungan dalam metode ini menghasilkan tiga komponen, yakni nilai HOI, tingkat cakupan atas kesempatan dasar, dan tingkat pemerataan distribusi. Nilai *coverage* diestimasi menggunakan model logistik, sementara nilai pemerataan distribusi dihitung berdasarkan formula tertentu dengan mempertimbangkan hasil dari komponen *coverage*.

*Dissimilarity index* (D) merupakan ukuran pemerataan atau ketimpangan kesempatan.

Indeks ini menghitung besaran perbedaan tingkat akses pemenuhan kebutuhan suatu kelompok dengan kondisi tertentu dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan secara keseluruhan. Indeks D dapat disajikan dalam persamaan berikut.

$$D = \frac{1}{2\bar{p}} \sum_{i=1}^n \alpha_i |p_i - \bar{p}| \quad \dots\dots\dots(2)$$

$i$  = kelompok individu yang berada pada kelompok keadaan tertentu

$p_i$  = cakupan dari kelompok ke- $i$

$\alpha_i$  = bobot yang menyatakan *share* dari jumlah individu yang berada pada kelompok ke- $i$  terhadap total populasi

$N$  = jumlah kelompok yang terbentuk berdasarkan keadaan.

Indeks D dihitung berdasarkan suatu himpunan keadaan. Dari himpunan keadaan tersebut perlu dilihat kontribusi dari masing-masing keadaan terhadap ketidaksetaraan kesempatan. Untuk melihat kontribusi dari setiap variabel keadaan terhadap total ketimpangan kesempatan digunakan metode *Shapley Decomposition*. Metode ini digunakan untuk mengukur besaran kontribusi dari keadaan individu terhadap ketimpangan akses terhadap suatu pemenuhan kebutuhan. Setiap penambahan variabel kondisi/keadaan akan meningkatkan indeks D yang akan menurunkan nilai HOI. Ilustrasinya, jika terdapat dua kelompok kondisi, A dan B yang keduanya tidak beririsan, maka  $D(A, B) \geq D(A)$  sehingga  $HOI(A, B) \leq HOI(A)$ .

Dengan demikian, dampak dari penambahan kondisi A pada suatu kelompok kondisi tertentu (S) dinyatakan sebagai berikut.

$$D_{A=} \sum_{S \subseteq N/A} \frac{|S|!(n-|S|-1)!}{n!} [D(S \cup \{A\}) - D(S)] \quad \dots\dots\dots(3)$$

$N$  = kelompok dari semua kondisi yang mungkin dari total  $n$  kondisi

$S$  = himpunan bagian dari  $N$  (terdiri dari  $s$  kondisi), tetapi tidak mengandung kondisi  $A$

$D(S)$  = indeks perbedaan dari kelompok kondisi  $S$

$D(S \cup \{A\})$  = indeks perbedaan yang dihitung berdasarkan kelompok kondisi  $S$  dan kondisi  $A$ .

Dengan demikian, penghitungan kontribusi dari kondisi  $A$  terhadap indeks ketimpangan dari seluruh kondisi  $\theta_A$  dinyatakan dengan formula sebagai berikut.

$$\theta_A = \frac{D_A}{D(N)}; \sum_{i \in N} \theta_i = 1 \dots\dots\dots(4)$$

### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2020. Data Susenas Maret 2020 ini merupakan data representatif terakhir yang dapat mewakili populasi. Cakupan responden yang digunakan pada penelitian ini hanya pada penduduk Kalimantan Timur yang berusia 7-18 tahun. Variabel yang digunakan antara lain.

1. Partisipasi sekolah anak usia 7-18 tahun. Kelompok partisipasi sekolah usia 7-15 tahun untuk pendidikan dasar dan partisipasi sekolah usia 16-18 tahun untuk pendidikan menengah. Variabel ini dinyatakan dalam kategorik (belum/tidak bersekolah dan sedang bersekolah).
2. Karakteristik anak, yakni jenis kelamin dan tempat tinggal anak. Kedua variabel ini dinyatakan dalam kategorik.
3. Karakteristik keluarga, yakni jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, status bekerja kepala rumah tangga, pengeluaran per kapita rumah tangga, dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga. Variabel jumlah anggota rumah tangga dan pengeluaran per kapita rumah tangga dinyatakan dalam variabel

rasio, sedangkan variabel lainnya dinyatakan dalam kategorik.

### Metode Analisis

Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menganalisis hasil pengukuran *HOI* terhadap ketimpangan akses pendidikan anak usia 7-18 tahun di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Pendekatan analisis yang digunakan yakni analisis secara deskriptif terhadap tabel dan grafik yang dihasilkan dari metode *HOI*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2015 para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai kesepakatan pembangunan global selama lima belas tahun ke depan. Salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyatakan bahwa segala bentuk kesenjangan harus segera dituntaskan hingga tahun 2030. Pembangunan harus bersifat universal, integratif, dan inklusif atau pembangunan yang tidak meninggalkan satu orangpun (*leave no one behind*). Dalam konteks ini, setiap negara di seluruh dunia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada satupun warga negaranya yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Tujuan keempat TPB/SDGs menargetkan semua anak laki-laki dan perempuan harus menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah serta menjamin akses pendidikan yang sama bagi semua anak (Bappenas, 2021). Dengan pendidikan yang merata serta berkualitas tentu akan mendorong pencapaian tujuan TPB/SDGs lainnya. Pendidikan yang merata tentu mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja yang produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan di bidang

pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). Semakin tinggi APS berarti semakin besar jumlah penduduk yang memiliki kesempatan menegenyam bangku sekolah. APS adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah dibandingkan jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut.

Tabel 1 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Kelompok Usia Sekolah di Kalimantan Timur 2019-2020

| Usia Sekolah | 2019  | 2020  |
|--------------|-------|-------|
| 7-12 Tahun   | 99,68 | 99,73 |
| 13-15 Tahun  | 98,21 | 99,07 |
| 16-18 Tahun  | 82,07 | 81,88 |

Sumber: Susenas Maret 2020

Selama periode 2019 hingga 2020, kurang dari satu persen penduduk berusia 7-15 tahun di Kalimantan Timur belum bersekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. Sementara itu, pada kelompok usia 16-18 tahun masih terdapat 18,12 persen penduduk yang belum pernah merasakan bangku sekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. APS menunjukkan sebagian besar penduduk usia 7-18 tahun di Kalimantan Timur telah menikmati bangku sekolah. Walau demikian, APS belum dapat memberikan informasi apakah layanan pendidikan yang disediakan sudah dinikmati secara merata atau hanya dinikmati oleh sebagian penduduk.

Ketimpangan biasanya diukur untuk melihat ketidaksetaraan dari sisi pendapatan. Namun, konsep ketimpangan pada era sekarang telah diperluas untuk mencakup banyak dimensi dasar kehidupan, seperti ketimpangan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Pemerintah Kalimantan Timur telah berupaya menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses bagi seluruh anak usia sekolah. Namun demikian perlu diketahui apakah layanan tersebut sudah dapat benar-benar dinikmati secara merata oleh anak usia sekolah.

Terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan akses terhadap kesempatan memperoleh layanan pendidikan di Kalimantan Timur. Indikator tersebut yakni kesempatan anak usia 7-15 tahun dalam mengakses pendidikan dasar (SD-SMP/ sederajat) dan kesempatan anak usia 16-18 tahun dalam mengakses pendidikan menengah (SMA sederajat).

Tabel 2 mengilustrasikan cakupan terhadap akses pendidikan dasar kelompok anak usia 7-15 hampir mencapai 100 persen. Kesempatan menuju akses pendidikan dasar juga sudah menunjukkan distribusi yang merata yang ditandai dengan indeks ketimpangan kesempatan pada pendidikan dasar yang relatif kecil. Hal ini menandakan bahwa program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah di Kalimantan Timur dapat dikatakan berhasil. Hampir seluruh penduduk berusia 7-15 tahun telah dapat mengenyam pendidikan dasar.

Tabel 2 Nilai *HOI*, *Dissimilarity Index*, dan *Coverage* pada Kesempatan Pendidikan Anak Usia 7-18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan di Kalimantan Timur

| Komponen             | Pendidikan Dasar (SD-SMP) | Pendidikan Menengah (SMA) |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Coverage</i>      | 99,52                     | 81,88                     |
| <i>Dissimilarity</i> | 0,16                      | 2,82                      |
| <i>HOI</i>           | 99,37                     | 79,57                     |

Sumber: Susenas Maret 2020 (diolah).

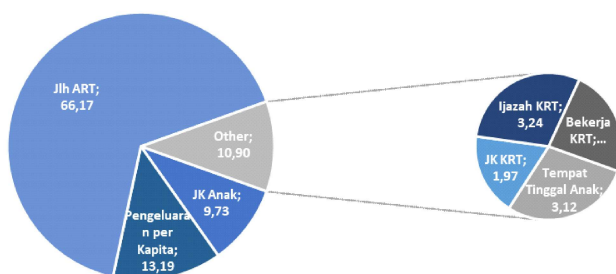
Hal yang berbeda terlihat pada kelompok anak usia 16-18 tahun dalam memperoleh akses ke pendidikan menengah. Pada kelompok pendidikan menengah, anak usia 16-18 tahun memiliki cakupan dan nilai *HOI* yang lebih rendah dibandingkan kelompok pendidikan dasar anak usia 7-15 tahun. Sekitar 81 persen penduduk anak usia 16-18 tahun di Kalimantan Timur telah mendapatkan akses ke pendidikan menengah.

Tabel 2 menunjukkan masih terdapat kesenjangan terhadap akses pendidikan menengah sekitar 2,82 persen antara cakupan dan nilai *HOI*. Sekitar 79 persen anak usia 16-18 tahun telah mengakses pendidikan menengah yang dialokasikan berdasarkan prinsip kesetaraan.

Perbedaan ketimpangan pendidikan ini disebabkan fokus pemerintah saat ini masih kepada kewajiban penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun. Amanat Konvensi Hak-Hak Anak juga menyatakan negara harus menjamin hak anak mendapatkan minimal pendidikan dasar. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa ternyata kebijakan untuk pendidikan menengah belum memberikan hasil yang maksimal seperti pada pendidikan dasar.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah yakni faktor tempat tinggal anak. BPS mencatat jumlah SD/SMP sederajat sebanyak 2.883 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sangat jauh berbeda dibandingkan jumlah SMA sederajat yang hanya berjumlah 523 unit (BPS Kalimantan Timur, 2020). Sekolah SD/SMP sederajat lebih mudah dijangkau oleh anak karena tersebar hampir di seluruh wilayah dibandingkan sekolah SMA sederajat yang sebagian besar terdapat di wilayah perkotaan.

Beberapa keadaan atau faktor di luar kontrol seseorang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan kesempatan. Gambar 1 menguraikan faktor-faktor yang berkontribusi

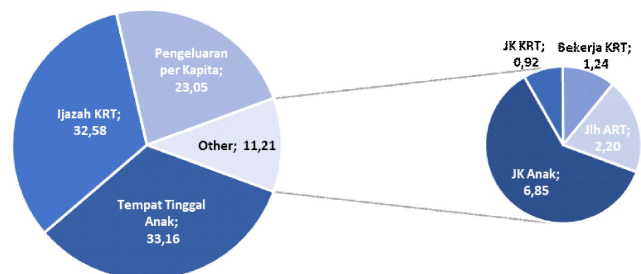


Gambar 1 *Shapley Decomposition* Ketimpangan Akses pada Pendidikan Dasar Anak Usia 7-15 tahun

terhadap adanya ketimpangan kesempatan pada pendidikan dasar untuk anak usia 7-15 tahun di Kalimantan Timur menurut *Shapley Decomposition*. Pada pendidikan dasar, adanya ketimpangan kesempatan sebagian besar disebabkan jumlah anggota rumah tangga tempat anak itu tinggal, disusul jenis kelamin anak, dan pengeluaran per kapita atau kondisi ekonomi keluarga anak.

Hasil ini cukup berbeda dengan kondisi pendidikan dasar secara umum di Indonesia (Darmawati & Suhariyanto, 2019). Secara umum, faktor yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia adalah kondisi keluarga anak tersebut, yakni pendidikan kepala rumah tangga, pengeluaran per kapita, dan wilayah tempat tinggal anak.

Sementara itu, Gambar 2 menjelaskan *Shapley Decomposition* dari faktor dominan penyebab terjadinya ketimpangan kesempatan terhadap akses pada pendidikan menengah di Kalimantan Timur. Ketimpangan kesempatan tersebut diakibatkan tempat tinggal anak, ijazah kepala rumah tangga, serta kondisi ekonomi keluarga anak. Faktor-faktor penyebab ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan menengah yang sama juga dirasakan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebanyakan sekolah menengah (SMA sederajat) berada di ibu kota kecamatan atau perkotaan. Kondisi keluarga juga cukup berpengaruh terhadap ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan menengah seorang



Gambar 2 *Shapley Decomposition* Ketimpangan Akses pada Pendidikan Menengah Anak Usia 16-18 tahun

anak. Kepala keluarga dengan pendidikan rendah dan kondisi ekonomi keluarga yang buruk dapat menyebabkan seorang anak tidak dapat menikmati akses ke pendidikan menengah.

Terdapat hubungan yang erat antara latar belakang keluarga, seperti hubungan pendidikan atau pendapatan orangtua dengan pendidikan anak (Areva, 2015; Björklund & Salvanes, 2011; Chevalier, Harmon, O'Sullivan, & Walker, 2013; Erola, Jalonen, & Lehti, 2016; Wicaksono, Sparrow, & Van Bergeijk, 2018). Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap pendidikan anak-anak mereka. Orang tua dengan tingkat pendidikan lebih tinggi biasanya juga akan menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Demikian pula dengan status ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan anak di dalam keluarga. Variabel latar belakang keluarga menjadi relevan karena seorang anak tidak dapat memilih latar belakang keluarga ketika dilahirkan.

Semua anak laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak/kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan. Namun demikian, kadangkala ketidaksetaraan gender masih menjadi penyebab adanya kesenjangan pendidikan di banyak negara (Incing, Hardianto, & Rusmiwari, 2013; Natasha, 2013; Fitrianti & Habibullah, 2012; Senadza, 2012).

Tabel 3 menunjukkan bahwa hampir tidak terdapat perbedaan akses ke pendidikan, baik dasar dan menengah pada masing-masing jenis kelamin. Hal ini ditunjukkan dari nilai *dissimilarity index* pada kelompok anak laki-laki hampir sama dengan kelompok anak perempuan pada kedua jenjang pendidikan.

Isu ketimpangan akses pendidikan dasar dan menengah yang diakibatkan bias gender ternyata tidak ditemui di tengah penduduk Kalimantan Timur. Masyarakat telah memandang bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa melihat jenis kelamin.

Tabel 3. Nilai *HOI*, *Dissimilarity Index*, dan *Coverage* pada Kesempatan Pendidikan Anak Usia 7-18 tahun menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Timur

| Komponen                   | Laki-Laki | Perempuan |
|----------------------------|-----------|-----------|
| <i>Pendidikan Dasar</i>    |           |           |
| <i>Coverage</i>            | 99,43     | 99,59     |
| <i>Dissimilarity</i>       | 0,19      | 0,21      |
| <i>HOI</i>                 | 99,24     | 99,38     |
| <i>Pendidikan Menengah</i> |           |           |
| <i>Coverage</i>            | 80,83     | 83,00     |
| <i>Dissimilarity</i>       | 2,94      | 2,92      |
| <i>HOI</i>                 | 78,45     | 80,57     |

Sumber: Susenas Maret 2020 (diolah)

Faktor wilayah tempat tinggal juga dapat turut memengaruhi ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan (Anas, Riana, & Apsari, 2015; Ali, 2011; Hakim, 2016; Vito & Krisnani, 2015). Sarana dan fasilitas pendidikan yang tidak merata di antara wilayah perkotaan dan perdesaan menyebabkan masih adanya ketimpangan terhadap akses pendidikan. Faktor tempat tinggal anak tidak menjadi penyebab dominan adanya ketimpangan akses ke pendidikan dasar. Namun, pada pendidikan menengah faktor ini menjadi salah satu penyebab dominan adanya ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan menengah. Sulitnya akses menuju sekolah ternyata juga dapat menurunkan minat orangtua untuk menyekolahkan anaknya (Hartono, 2008).

Tabel 4 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai *dissimilarity index* maupun nilai *HOI* pada kelompok pendidikan dasar antara wilayah perdesaan dan perkotaan di Kalimantan Timur. Hampir semua anak, baik yang tinggal di wilayah perdesaan maupun perkotaan, dapat mengenyam pendidikan dasar. Namun, pada pendidikan menengah terjadi perbedaan *nilai dissimilarity index* yang cukup besar antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

Tabel 4. Nilai *HOI*, *Dissimilarity Index*, dan *Coverage* pada Kesempatan Pendidikan Anak Usia 7-18 tahun menurut Jenjang Pendidikan dan Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal Anak di Kalimantan Timur

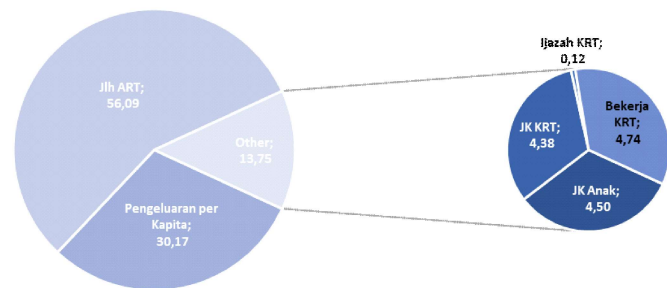
| Komponen                   | Desa  | Kota  |
|----------------------------|-------|-------|
| <i>Pendidikan Dasar</i>    |       |       |
| <i>Coverage</i>            | 99,45 | 99,56 |
| <i>Dissimilarity</i>       | 0,17  | 0,19  |
| <i>HOI</i>                 | 99,28 | 99,37 |
| <i>Pendidikan Menengah</i> |       |       |
| <i>Coverage</i>            | 76,27 | 84,57 |
| <i>Dissimilarity</i>       | 4,63  | 2,46  |
| <i>HOI</i>                 | 72,74 | 82,50 |

Sumber: Susenas Maret 2020 (diolah)

Perbedaan nilai *HOI* antara wilayah perdesaan dan perkotaan menunjukkan bahwa kesempatan terhadap akses ke pendidikan menengah belum cukup merata di Kalimantan Timur. Di wilayah perdesaan, sekitar 73 persen kesempatan akses terhadap pendidikan menengah telah dialokasikan berdasarkan prinsip kesetaraan, sedangkan di wilayah perkotaan lebih tinggi yakni sekitar 82 persen. *Dissimilarity index* di wilayah perdesaan juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan akses terhadap pendidikan menengah yang ada di wilayah perdesaan belum dapat dinikmati secara merata. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kalimantan Timur agar semua anak yang berusia 16-18 tahun memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat mengakses pendidikan menengah di manapun tempat tinggalnya.

Faktor-faktor penyebab ketimpangan penduduk usia 16-18 tahun di wilayah pedesaan berdasarkan *Shapley Decomposition* dapat diilustrasikan melalui Gambar 3. Ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan menengah di wilayah perdesaan diakibatkan jumlah anggota rumah tangga dalam keluarga dan kondisi ekonomi keluarga, serta faktor lain seperti status bekerja dan jenis kelamin kepala

rumah tangga, serta jenis kelamin anak. Banyaknya jumlah anggota rumah tangga juga menjadi pertimbangan bagi rumah tangga untuk mengambil keputusan mengenai kelangsungan pendidikan. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi kurang baik, orangtua akan mempertimbangkan di antara anggota rumah tangga siapakah yang akan melanjutkan pendidikan (Perdana, 2015).



Gambar 3 *Shapley Decomposition* Ketimpangan Kesempatan pada Pendidikan Menengah Anak Usia 16-18 tahun di Perdesaan

Terjadi hubungan yang negatif antara variabel kondisi ekonomi rumah tangga dengan ketimpangan pendidikan (Drajea & O'Sullivan, 2014; Fitriyaningsih, Genjik & Rosyid, 2016; Løken, 2010; Todaro & Smith, 2012). Ekonomi rumah tangga yang buruk menyebabkan tingginya ketimpangan pendidikan. Kondisi ekonomi keluarga berperan pada proses pendidikan anak. Kondisi ekonomi keluarga yang baik akan menyebabkan orangtua tidak ragu menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga ketimpangan pendidikan tidak terjadi.

*Human capital* (modal manusia) mengacu pada pengembangan kapasitas manusia termasuk di bidang pendidikan untuk meningkatkan produktivitas. Pengembangan sumber daya manusia dinilai menjadi penggerak kemajuan ekonomi suatu negara/wilayah (Todaro & Smith, 2012). Kebijakan dan program yang tepat untuk menyukkseskan pencapaian di bidang pendidikan akan membawa keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan lainnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Kesempatan akses terhadap pendidikan merupakan isu strategis dalam upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan. Proses pembangunan yang adil harus memastikan bahwa kesempatan bagi seluruh anak untuk mengakses layanan pendidikan tidak boleh disebabkan adanya kondisi di luar kendali anak, seperti jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, atau latar belakang orangtua.

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan sejak tahun 1994 dapat dikatakan berhasil diwujudkan oleh Pemerintah Kalimantan Timur. Hal ini juga terlihat dari Rata-rata Lama Sekolah yang telah mencapai 9,77 persen (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2020).

Tantangan selanjutnya bagi Pemerintah Kalimantan Timur yaitu mengurangi kesenjangan yang masih terjadi pada pendidikan menengah. BPS mencatat angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada penduduk Kalimantan Timur berusia 7 tahun ke atas yaitu sebesar 13,77 persen. HLS dijelaskan sebagai harapan lamanya seorang anak merasakan bangku sekolah. Berbagai kebijakan harus dibuat agar anak yang sedang bersekolah dapat terus melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya.

Sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur tidak lagi menjadikan perbedaan gender sebagai alasan dalam mengakses pendidikan, terutama pada akses pendidikan dasar. Masyarakat Kalimantan Timur telah menyadari pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anaknya.

Di sisi lain, faktor latar belakang keluarga dan lokasi tempat tinggal masih menjadi alasan seseorang tidak dapat mengakses pendidikan menengah. Prioritas anak yang akan melanjutkan sekolah, biaya keperluan sekolah, termasuk biaya menuju sekolah akan menjadi pertimbangan orang tua untuk terus menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Berbagai reformasi kebijakan pendidikan harus dibuat. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi keterkaitan antara tingkat pendidikan seorang anak dengan keadaan yang berada di luar kontrol seorang anak, yaitu latar belakang keluarga serta lokasi tempat tinggal.

### Saran

Beberapa saran kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan, terutama untuk pendidikan menengah. Kebijakan tersebut seperti memperbanyak jumlah sekolah menengah di wilayah pedesaan, mempermudah akses menuju sekolah melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, penyediaan sarana transportasi yang mudah, murah, dan layak bagi anak sekolah, serta penyediaan fasilitas asrama/tempat tinggal bagi anak yang bersekolah di wilayah di luar tempat tinggalnya.

Selain itu, pemanfaatan metode *HOI* yang lebih luas dapat digunakan untuk melihat kesenjangan beberapa indikator pendidikan lainnya. Misalnya, metode *HOI* untuk melihat kesenjangan akses terhadap status literasi penduduk, kesenjangan akses menuju pendidikan tinggi, kesenjangan akses pendidikan bagi para penyandang disabilitas, dan berbagai kesenjangan lain di bidang pendidikan.

## PUSTAKA ACUAN

- Adriani, E. (2019). Pengukuran modal manusia (Suatu studi literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(1), 176. doi.org/10.33087/jmas.v4i1.86
- Anas, A.Y., Riana, A.W., & Apsari, N.C. (2015). Desa dan kota dalam potret pendidikan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 418–422. doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13592.

- Areva, D. (2015). Pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan motivasi orang tua terhadap tingkat pendidikan anak pedagang toko/kios di Pasar Raya Kota Padang. *Economica: Journal of Economic and Economic Education*, 4(1), 52–60. doi.org/10.22202/economica.2015.v4.i1.270.
- Azzizah, Y. (2015). Socio-economic factors on Indonesia education disparity. *International Education Studies*, 8(12), 218. doi.org/10.5539/ies.v8n12p218
- Bappenas. (2021). *Sustainable Development Goals*. <http://sdgsindonesia.or.id/>
- Ali, N.B.V. (2011). Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(1), 43. doi.org/10.24832/jpnk.v17i1.6
- Björklund, A., & Salvanes, K. G. (2011). Education and family background: Mechanisms and policies. *Handbook of the Economics of Education*, 3(11), 201–247. doi.org/10.1016/B978-0-444-53429-3.00003-X.
- BPS Propinsi Kalimantan Timur. (2019). *Statistik Infrastruktur Provinsi Kalimantan Timur 2019*. BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Bustomi, M.J. (2012). Ketimpangan pendidikan antar kabupaten/kota dan implikasinya di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2). doi.org/10.15294/edaj.v1i2.477
- Chevalier, A., Harmon, C., O’ Sullivan, V., & Walker, I. (2013). The impact of parental income and education on the schooling of their children. *IZA Journal of Labor Economics*, 2(1), 1–22. doi.org/10.1186/2193-8997-2-8
- Drajea, A.J., & O’Sullivan, C. (2014). Influence of parental education and family income on children’s education in rural Uganda. *Global Education Review*, 1(3), 149–166.
- Erola, J., Jalonen, S., & Lehti, H. (2016). Parental education, class, and income over early life course and children’s achievement. *Research in Social Stratification and Mobility*, 44, 33–43. doi.org/10.1016/j.rssm.2016.01.003
- Fitrianingsih, Genjik S.B., & Rosyid, R. (2016). Pengaruh pendapatan orangtua terhadap tingkat pendidikan anak Desa Sungai Asam Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(5), 1–11. [jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/15180/13372](http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/15180/13372)
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64.
- Harahap, E.S., Maipita, I., & Rahmadana, M.F. (2020). Determinant analysis of education inequalities in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1067–1082. doi.org/10.33258/birci.v3i2.937
- Hartono, D. (2008). Akses pendidikan dasar: Kajian dari segi transisi SD ke SMP. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, III(2), 45–73.

- Hidayat, A. (2018). Kesenjangan sosial terhadap pendidikan sebagai pengaruh era globalisasi. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 15–25. doi.org/10.36805/jjih.v2i1.400
- Incing, V., Hardianto, W. T., & Rusmiwari, S. (2013). Kesenjangan gender (perempuan) dalam mendapatkan pendidikan pada masyarakat pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 38–40.
- Indra. (2015). *Empat kajian tentang polarisasi, ketimpangan, dan konflik sosial di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Jemmal, H., & Amara, M. (2018). On measuring and decomposing inequality of opportunity among children: Evidence from Tunisia. *Applied Research in Quality of Life*, 13(1), 137–155. doi.org/10.1007/s11482-017-9511-1.
- Darmawati, I.G.A.B. & Suhariyanto. (2019). *Statistik gender tematik, kajian ketimpangan kesempatan anak terhadap pelayanan kebutuhan dasar di Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.
- Løken, K.V. (2010). Family income and children's education: Using the Norwegian oil boom as a natural experiment. *Labour Economics*, 17(1), 118–129. doi.org/10.1016/j.labeco.2009.06.002
- Mardison, E. (2021). A change to improve health quality: Benefits of the human opportunity Index (HOI). *Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 45–53.
- Mardison, E. (2020). Improving education: Using the human opportunity index in Sumatra Barat Province. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 7(02), 169–182.
- Mokaddem, L., & Saied, I. ben. (2019). *The Formulation of a regional opportunity index: empirical evidence from Tunisia* (No. 1375).
- Molinas Vega, J.R., de Barros, R.P., Chanduvi, J.S., Giugale, M., Cord, L.J., Pessino, C., & Amer, H. (2012). *Do our children have a chance? A human opportunity report for Latin America and the Caribbean*. Directions in development; poverty. World Bank.
- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan: Faktor penyebab, dampak, dan solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 12(1), 53–64. doi.org/10.24014/marwah.v12i1.513
- Newman, J. (2012). Human Opportunity Index (HOI) National - Equality of Children's Opportunities in Pakistan. World Bank Policy Paper Series on Pakistan; no. PK 8/12. World Bank, Washington, DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/06/19309502/human-opportunity-index-hoi-provinces-equality-childrens-opportunities-pakistanbr>
- Barros, R.P., Vega, J.R., Saavedra, J., Carvallo, M.A., Franco, S., & Freije, S. (2008). Measuring inequality of opportunities for children. World Bank Report, 52.
- Perdana, N. S. (2015). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan untuk anak-anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 279–298. <https://core.ac.uk/download/pdf/227142787.pdf>
- Fitrianti, R. & Habibullah. (2012). Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan: Studi pada perempuan di kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 17(01), 85–100. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/809/407>

- Senadza, B. (2012). Education inequality in Ghana: Gender and spatial dimensions. *Journal of Economic Studies*, 39(6), 724–739. doi.org/10.1108/01443581211274647.
- Sholikhah, N., Suratman, B., Soesatyo, Y., & Soejoto, A. (2014). Analisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(20), 176–182.
- Son, H. H. (2012). *Inequality of human opportunities in developing Asia* (Issue 328). Asean Development Bank.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2012). *Economic development*, (11<sup>th</sup> Ed.). Elsevier.
- Vani, B.P., & Madheswaran, S. (2018). Inequalities of human opportunities in India: A state-level analysis. *Indian Journal of Human Development*, 12(2), 248–264. doi.org/10.1177/0973703018791385.
- Vito, B., & Krisnani, H. (2015). Kesenjangan pendidikan desa dan kota. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 247–251. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13533
- Wicaksono, W., Sparrow, R. A., & Van Bergeijk, P. (2018). The impact of parents' education and attending vocational high school to college entrance. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 8(1), 12. https://doi.org/10.21831/jpv.v8i1.17938